

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI
PEMERINTAHAN DAERAH DALAM
PENGELOLAAN KEUANGAN YANG DILAKUKAN
OLEH BENDAHARA PENGELUARAN
DI KABUPATEN KUPANG**

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Magister Sains (M.Si.)**

**pada
Program Studi Magister Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya**

Oleh:

**MEX OMEGA NALLE
NIM. 0701208212125041**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
Dalam Pengelolaan Keuangan Yang Dilakukan Oleh Bendahara
Pengeluaran Di Kabupaten Kupang

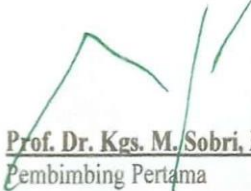
Nama Mahasiswa : Mex Omega Nalle


NIM : 0701208212125041

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Bidang Kajian Utama : Kebijakan Publik

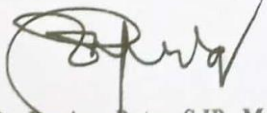
Menyetujui


Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si.
Pembimbing Pertama


Prof. Dr. Sriati, M.S.
Pembimbing Kedua

Mengetahui

Koordinator Program Studi
Magister Administrasi Publik




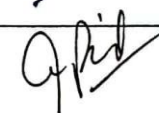



Dr. Ranjasa Putra, S.IP., M.Si.
NIP. 19780512 200212 1 003

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya


Prof. Dr. Alfitri, M.Si.
NIP. 19660122 199003 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Tesis : Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Yang Dilakukan Oleh Bendahara Pengeluaran Di Kabupaten Kupang
Nama : Mex Omega Nalle
NIM : 07012082125041
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Bidang Kajian : Kebijakan Publik
Tanggal Ujian : 09 Maret 2023

No	Nama Dosen	Tim Penguji	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si.	Ketua	
2.	Prof. Dr. Sriati, M.S.	Sekretaris	
3.	Prof. Dr. Waspodo, M.A., P.Hd.	Anggota	
4.	Dr. Ridho Taqwa, M.Si.	Anggota	
5.	Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si.	Anggota	
6.	Dr. Imam Sofyan, S.Sos., M.Si.	Anggota	

Palembang, 09 Maret 2023
Menyetujui,
Koordinator Program Studi
Magister Administrasi Publik



Dr. Raniasa Putra S.IP., M.Si.
NIP. 19780512-200212 1 003

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mex Omega Nalle
Nim : 0701208212125041
Tempat / Tanggal Lahir : Rote / 14 Mei 1987
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Bidang Kajian Utama : Kebijakan Publik
Judul Tesis : Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Yang Dilakukan Oleh Bendahara Pengeluaran Di Kabupaten Kupang.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi, serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang, 09 Maret 2023
Yang menyatakan,



Mex Omega Nalle
NIM. 0701208212125041

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mex Omega Nalle
NIM : 0701208212125041
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Sriwijaya dan/atau Program Magister Administrasi Publik **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Yang Dilakukan Oleh Bendahara Pengeluaran Di Kabupaten Kupang”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti noneklusif ini Universitas Sriwijaya dan/atau Program Magister Administrasi Publik berhak menyimpan mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasi tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Di buat di : Palembang
Pada tanggal : 09 Maret 2023
Yang menyatakan,



Mex Omega Nalle
NIM. 0701208212125041

ABSTRACT

THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF LOCAL GOVERNMENT INFORMATION SYSTEMS IN FINANCIAL MANAGEMENT CARRIED OUT BY EXPENDITURE TREASURERS IN THE KUPANG DISTRICT

Scientific paper in the form of a thesis, March 2023

Mex Omega Nalle; Supervised by Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si., and Prof. Dr. Sriati, M.S.

Xxii + 183 pages, 17 tables, 21 figures, 6 appendices

The purpose of this study was to analyze the effectiveness of the use of SIPD in financial management carried out by the Expenditure Treasurer in Kupang Regency. The results found that the use of SIPD for financial management in Kupang Regency has not been effective. The legal basis indicator is said to be effective and the other 6 (six) indicators are not effective. The achievement period indicator shows that the target of achieving an electronically integrated financial governance system within 1 (one) fiscal year has not been achieved. Indicators of concrete target objectives show that the administration system component is not electronically integrated with the reporting system component. The indicator of the procedure factor for using SIPD shows that the head of the regional work unit level related to financial management does not understand the procedure for using SIPD. The socialization indicator shows that the lack of socialization before and after the implementation of SIPD caused many of the Spending Treasurers to skip the stages of financial management. Indicators of improving human resource capabilities show that technical guidance on the use of SIPD and technical guidance on financial management has not been carried out, causing many Spending Treasurers to experience difficulties in financial management. The facilities and infrastructure indicator shows that the laptop is in accordance with specifications but the internet provided by the Communication and Information Technology Office (Diskominfo) cannot be used to operate SIPD and the internet network provider Telkomsel is still unstable (changing) in the Kupang Regency area hampering the electronic financial management system.

Keywords : effectiveness, Local Government Information System (SIPD), financial management, expenditure treasurer

Literature : 71 (1975-2023)

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN YANG DILAKUKAN OLEH BENDAHARA PENGELUARAN DI KABUPATEN KUPANG.

Karya tulis ilmiah berupa Tesis, Maret 2023

Mex Omega Nalle; dibimbing oleh Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si. dan Prof. Dr. Sriati, M.S.

Xxii + 183 halaman, 17 tabel, 21 gambar, 6 lampiran

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penggunaan SIPD dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran di Kabupaten Kupang. Hasil penelitian menemukan bahwa penggunaan SIPD untuk pengelolaan keuangan di Kabupaten Kupang belum efektif. Indikator dasar hukum dikatakan efektif dan 6 (enam) indikator lainnya belum efektif. Indikator kurun waktu pencapaian itu ditentukan menunjukkan bahwa target tercapainya sistem tata kelola keuangan yang terintegrasi secara elektronik dalam 1 (satu) tahun anggaran belum tercapai. Indikator sasaran target konkrit menunjukkan bahwa komponen sistem penatausahaan tidak terintegrasi secara elektronik dengan komponen sistem pelaporan. Indikator faktor prosedur penggunaan SIPD menunjukkan bahwa pimpinan tingkat SKPD yang berkaitan pengelolaan keuangan belum paham prosedur penggunaan SIPD. Indikator sosialisasi menunjukkan bahwa minimnya sosialisasi sebelum dan sesudah penerapan SIPD menyebabkan banyak dari Bendahara Pengeluaran melompati tahapan pengelolaan keuangan. Indikator peningkatan kemampuan SDM menunjukkan bahwa bimtek penggunaan SIPD dan bimtek pengelolaan keuangan belum dilakukan menyebabkan banyaknya Bendahara Pengeluaran mengalami kesulitan dalam pengelolaan keuangan. Indikator sarana dan prasarana menunjukkan bahwa laptop sudah sesuai spesifikasi namun internet yang disediakan oleh Diskominfo tidak bisa digunakan untuk mengoperasikan SIPD dan jaringan internet provider Telkomsel masih labil (berubah-ubah) di wilayah Kabupaten Kupang sehingga menghambat sistem pengelolaan keuangan secara elektronik.

Kata Kunci : efektivitas, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), pengelolaan keuangan, bendahara pengeluaran

Kepustakaan : 71 (1975-2023)

SUMMARY

THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF LOCAL GOVERNMENT INFORMATION SYSTEMS IN FINANCIAL MANAGEMENT CARRIED OUT BY EXPENDITURE TREASURERS IN THE KUPANG DISTRICT

Scientific paper in the form of a thesis, March 2023

Mex Omega Nalle; supervised by Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si., and Prof. Dr. Sriati, M.S.

Xxii + 183 pages, 17 tables, 21 figures, 6 appendices

SIPD is regulated in Minister of Home Affairs Regulation Number 70 of 2019 concerning Regional Government Information Systems (SIPD). SIPD is a system that documents and administers. It processes regional development data, including regional development information, regional financial information, and other regional government information, presented to local governments and the public. The information in SIPD will be collected in one database so that it can be used as a basis for policymaking at the regional level. Kupang Regency implemented SIPD in 2020 for development planning and in 2021 for the regional financial management system. In financial management carried out by the Expenditure Treasurer, it turns out to cause several problems, such as hampering financial administration. In terms of reporting, it causes the preparation of annual and semester reports, which cannot be done electronically using SIPD. This condition is also supported by previous research, which found that the application of SIPD has not been supported by the knowledge and skills of SIPD users, system errors and socialization of the use of SIPD which is very minimal, causing the implementation of planning documents, budgeting, and financial management to be constrained.

The research examined the effectiveness of the Expenditure Treasurer's use of SIPD in financial management. Duncan's effectiveness theory was used to investigate the efficacy of SIPD from 3 (three) aspects, namely aspects of goal achievement, integration, and adaptation. The research used descriptive qualitative methods with data collection techniques through observation, interviews, and documentation studies. The informants of this research came from the Spending Treasurer, the Head of the Subdivision of Finance and Assets of the Regional Work Unit, the head of the Regional Financial and Asset Management Agency who was directly related to the financial management process using SIPD in Kupang Regency.

The results showed that using SIPD in financial management by the Expenditure Treasurer in Kupang Regency was ineffective. Of the 7 (seven) indicators studied from goal achievement, integration, and adaptation, it was found that only the legal basis indicator was effective. The other 6 (six) indicators show that it is not practical. The achievement period indicator shows that the target of achieving an electronic-based financial governance system has not been achieved because the administration component is not electronically integrated with the reporting component. Indicators of concrete target goals show that the electronic-based economic governance system has not been achieved because the

administration system is often erroneous, and the financial reporting system cannot be done at all. Indicators of procedural factors for using SIPD show that the Spending Treasurer often skips or skips stages in the administration process, the proposal function, the verification function, and the accountability function are not carried out properly by the leadership in the Regional Work Unit. The socialization indicator shows that the lack of socialization before and after the implementation of SIPD causes a lack of technical understanding of the use of SIPD. The Human Resources improvement indicator shows that the lack of technical guidance on using SIPD and technical advice on financial management causes many Spending Treasurers to experience difficulties in financial management. The infrastructure indicator shows that the laptop follows specifications. Still, the internet provided by the Communication and Informatics Office cannot operate SIPD because the network is slow. The 4G internet network serves not all sub-district government centers in Kupang Regency by Telkomsel.

From the analysis that has been carried out on the effectiveness of SIPD, several factors were found that affect the effectiveness of SIPD in financial management, namely the lack of technical socialization of the use of SIPD before and after the implementation of SIPD. The proposal function, verification function, and accountability function are not carried out properly because Regional Work Unit officials related to financial administration do not understand the procedures for using SIPD and do not understand how to use SIPD. The third factor is the Spending Treasurer's Human Resources (HR) level of capability. The average appointed Expenditure Treasurer does not have the competence of financial management and does not meet the requirements to be appointed as an Expenditure Treasurer. The wifi-based internet network provided by the Communication and Informatics Office cannot be used to operate SIPD because the network is slow. The SIPD application often makes errors because it is still being improved. The last factor is that the internet network provided by Telkomsel is still unstable in the Kupang Regency government centre (Oelamasi), and not all sub-district government centres in Kupang Regency have not been connected to Telkomsel's 4G internet network.

So it is recommended to carry out technical guidance on the use of SIPD, technical advice on financial management, increase the speed of the wifi-based network provided by Diskominfo, and work with Telkomsel to improve 4G internet speeds in the Kupang district government centre as well as providing a 4G internet network for sub-district government centres in Kupang Regency.

Keywords : effectiveness, Local Government Information System (SIPD), financial management, expenditure treasurer

Kepustakaan : 71 (1975-2023)

RINGKASAN

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN YANG DILAKUKAN OLEH BENDAHARA PENGELUARAN DI KABUPATEN KUPANG

Karya tulis ilmiah berupa Tesis, Maret 2023

Mex Omega Nalle; dibimbing oleh Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si. dan Prof. Dr. Sriati, M.S.

Xxii + 183 halaman, 17 tabel, 21 gambar, 6 lampiran

SIPD diatur dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). SIPD merupakan sistem yang mendokumentasi dan mengadministrasi serta mengolah data pembangunan daerah, yang didalamnya memuat tentang informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang disajikan dalam bentuk informasi kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Informasi yang ada di SIPD nantinya akan terkumpul dalam satu database sehingga bisa digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan di tingkat daerah. Kabupaten Kupang telah menerapkan SIPD sejak tahun 2020 untuk perencanaan pembangunan dan tahun 2021 untuk sistem pengelolaan keuangan daerah. Dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran ternyata menimbulkan beberapa permasalahan seperti terhambatnya penatausahaan keuangan dan dari segi pelaporan menimbulkan penyusunan laporan tahunan dan semester yang tidak bisa dilakukan secara elektronik menggunakan SIPD. Kondisi ini didukung juga oleh penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa penerapan SIPD belum didukung oleh pengetahuan dan keterampilan pengguna SIPD, sistem yang error dan sosialisasi penggunaan SIPD yang sangat minim sehingga menyebabkan pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan, penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan terkendala.

Penelitian dilakukan untuk mengkaji efektivitas penggunaan SIPD dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran. Teori efektivitas Duncan digunakan untuk mengkaji efektivitas SIPD dari 3 (tiga) aspek yaitu aspek pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Informan dari penelitian ini berasal dari unsur Bendahara Pengeluaran, Kasubag Keuangan dan Aset SKPD, pimpinan BPKAD yang berhubungan langsung dengan proses pengelolaan keuangan menggunakan SIPD di Kabupaten Kupang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan SIPD dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran di Kabupaten Kupang belum efektif. Dari 7 (tujuh) indikator yang diteliti dari aspek pencapaian tujuan, aspek integrasi dan aspek adaptasi ditemukan bahwa hanya indikator dasar hukum yang dikatakan efektif. 6 (enam) indikator lainnya menunjukkan belum efektif. Indikator kurun waktu pencapaian itu ditentukan menunjukkan bahwa target tercapainya sistem tata kelola keuangan berbasis elektronik belum tercapai karena komponen penatausahaan tidak terintegrasi secara elektronik dengan komponen

pelaporan. Indikator sasaran target konkrit menunjukkan bahwa belum tercapainya sistem tata kelola keuangan berbasis elektronik karena sistem penatausahaan yang sering error dan sistem pelaporan keuangan yang tidak bisa dilakukan sama sekali. Indikator faktor prosedur penggunaan SIPD menunjukkan bahwa fungsi pengusulan, fungsi verifikasi dan fungsi pertanggungjawaban tidak dilakukan dengan benar oleh pimpinan di SKPD sehingga bisa disimpulkan bahwa pimpinan tingkat SKPD yang berkaitan pengelolaan keuangan belum paham prosedur penggunaan SIPD. Indikator sosialisasi menunjukkan bahwa minimnya sosialisasi sebelum dan sesudah penerapan SIPD menyebabkan kurang pemahaman teknis penggunaan SIPD sehingga Bendahara Pengeluaran sering melewati atau melompat tahapan dalam proses penatausahaan. Indikator peningkatan SDM menunjukkan bahwa minimnya bimtek penggunaan SIPD dan bimtek pengelolaan keuangan menyebabkan banyaknya Bendahara Pengeluaran mengalami kesulitan dalam pengelolaan keuangan. Indikator sarana prasarana menunjukkan bahwa laptop sudah sesuai spesifikasi namun internet yang disediakan oleh Diskominfo tidak bisa digunakan untuk mengoperasikan SIPD karena jaringan lambat dan belum semua pusat pemerintahan kecamatan di Kabupaten Kupang dilayani jaringan internet 4G oleh provider Telkomsel.

Dari analisis yang telah dilakukan terhadap efektivitas SIPD, ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas SIPD dalam pengelolaan keuangan, yaitu minimnya sosialisasi teknis penggunaan SIPD sebelum dan sesudah penerapan SIPD. Fungsi pengusulan, fungsi verifikasi dan fungsi pertanggungjawaban tidak dilakukan dengan benar karena pejabat SKPD yang terkait dengan penatausahaan keuangan, belum paham prosedur penggunaan SIPD dan belum paham cara menggunakan SIPD. Faktor ketiga adalah tingkat kemampuan SDM Bendahara Pengeluaran. Dimana Bendahara Pengeluaran yang ditunjuk rata-rata tidak mempunyai kompetensi ilmu pengelolaan keuangan dan tidak memenuhi syarat diangkat menjadi Bendahara Pengeluaran. Internet berbasis jaringan wifi yang disediakan oleh Diskominfo tidak bisa digunakan untuk mengoperasikan SIPD karena jaringan yang lambat. Aplikasi SIPD sering error karena masih dalam tahap penyempurnaan. Faktor terakhir adalah jaringan internet yang disediakan oleh provider Telkomsel masih labil (berubah-ubah) di lingkungan pusat pemerintahan Kabupaten Kupang (Oelamasi) dan belum semua pusat pemerintahan wilayah kecamatan di Kabupaten Kupang belum terkoneksi dengan jaringan internet 4G Telkomsel.

Maka disarankan untuk melaksanakan bimtek penggunaan SIPD, bimtek pengelolaan keuangan, meningkatkan kecepatan jaringan berbasis wifi yang disediakan oleh Diskominfo dan bekerja sama dengan pihak Telkomsel untuk meningkatkan kecepatan jaringan internet 4G di pusat pemerintahan Kabupaten Kupang serta menyediakan jaringan internet 4G untuk pusat pemerintahan wilayah kecamatan di Kabupaten Kupang.

Kata Kunci : Efektivitas, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), pengelolaan keuangan, Bendahara Pengeluaran

Literature : 71 (1975-2023)

KATA PENGANTAR

Haleluya, Puji Tuhan, segala puji syukur hanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Penolong dan Juru Selamat. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan pembahasan Tesis yang berjudul “Efektivitas penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran di Kabupaten Kupang”.

Tesis ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Tesis ini mengulas tentang efektivitas penggunaan SIPD dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran di Kabupaten Kupang.

Penulis ingin mengucapkan limpah terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si. selaku pembimbing I dan Prof. Dr. Sriati, M.S. selaku pembimbing II atas ketulusan hati dan kesabarannya dalam membimbing serta keikhlasannya dalam meluangkan waktu memberikan bimbingan, arahan, saran dan nasehat kepada penulis dalam rangka menyelesaikan penyusunan Tesis ini dengan baik.

Ucapan terima kasih juga ingin penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu sehingga penulis dapat melanjutkan dan melaksanakan pendidikan Magister, kepada Yth:

1. Kepala Pusbindiklatren Bappenas yang telah memberikan kesempatan dan beasiswa kepada Penulis untuk mengikuti pendidikan pada Program Studi Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Sriwijaya;
2. Bupati Kupang yang telah memberikan tugas belajar kepada penulis untuk mengikuti seleksi beasiswa Pusbindiklatren Bappenas;
3. Prof. Dr. Alfitri, M.Si. sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya;
4. Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si. sebagai Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan saran dan masukan serta motivasi dalam menyelesaikan pembahasan Tesis;

5. Dosen pengajar Magister Administrasi Publik Universitas Sriwijaya yang banyak memberikan ilmu dan pengalamannya selama perkuliahan;
6. Class of Bappenas Usri 2021 (Mas Asrul, Mas Darli, Mbak Nia, Susi Susanti, Mas Pring, Mbak Evi, Bro Lucky, Mas Arif, Bro Hamzah, Mas Fedrie, Mbak Tika, Mbak Lisa dan Kang Yana) yang sama-sama menimba ilmu dan berbagi ilmu;
7. Informan (Ibu Anna, Kak Ois, Kak Nita, Kak Alex, Kak Dorkas, Om Doni, Kak Jack, Om Ben, Ibu Arijanti, Bro Calvin, Om Ryan) yang memberikan waktu, kesempatan dan data bagi penulis;
8. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Tesis.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis mengucapkan limpah terima kasih. Semoga Tuhan Sang Pencipta dan Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat memberkati kita semua. **SODA MOLEK dan IMANUEL.**

Palembang, Maret 2023
Penulis

Mex Omega Nalle

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Ask, and it shall be given to you. Seek, and ye shall find. Knock, and it shall be opened unto you.”

Matthew, 7:7

“Tidak ada hal di dunia ini yang tidak ada caranya. Kamu hanya perlu menemukan caranya.”

Eripson Tallulangi (2016)

“Setiap kita hanya akan mendapat sedikit pelajaran dari kemenangan, tetapi mendapat banyak ilmu dari kekalahan.”

#pepatah kuno jepang#

Tesis ini saya persembahkan kepada :

Almarhum Ayah (Imanuel Nalle), Ibu (Marlen Octavianus), Mama Ena, Kakak (Max), Adik (Adel dan Bonita).

Beserta seluruh keluarga dan sahabat yang mendukung dalam Doa, cinta dan semangat.

Semoga kita diberikan umur panjang dan kebahagiaan.

IMANUEL

AMIN.

RIWAYAT HIDUP



Penulis Tesis ini, **Mex Omega Nalle**, lahir di Baidaloen (Thie - Pulau Rote), Nusa Tenggara Timur pada tanggal 14 Mei 1987. Penulis adalah anak kedua dari empat bersaudara pasangan Bapak Alm. Imanuel Nalle dan Ibu Marlen Octavianus. Penulis memulai pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri Lotelutun Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao dan tamat pada tahun 1999. Kemudian penulis menamatkan pendidikan di SLTP Negeri 1 Rote Barat Daya pada tahun 2002 dan lulus tahun 2005 pada pendidikan tingkat SLTA di SMK Diakui Wira Karya Kupang. Penulis melanjutkan pendidikan Strata-1 di Universitas Nusa Cendana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Sosiologi hingga lulus pada tahun 2013. Penulis bekerja sebagai Analis Peraturan Administrasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kupang pada tahun 2019 - sekarang. Pada tahun 2021 penulis melanjutkan pendidikan Strata-2 pada Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Sriwijaya melalui program beasiswa dari Pusbindiklatren Bappenas. Penulis menyusun Tesis dengan judul “Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Yang Dilakukan Oleh Bendahara Pengeluaran Di Kabupaten Kupang.”

DAFTAR ISI

	Halaman
<i>ABSTRACT</i>	vi
ABSTRAK	vii
<i>SUMMARY</i>	viii
RINGKASAN	x
KATA PENGANTAR	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiv
RIWAYAT HIDUP	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
DAFTAR AKRONIM DAN SINGKATAN.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. Landasan Teori.....	8
2.1.1. Implementasi Kebijakan Publik.....	9
2.1.2. Kajian Teori Efektivitas	12
2.1.3. Pengukuran Efektivitas	13
2.1.4. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	24
2.1.5. Konsep Pengelolaan Keuangan	26
2.1.6. Konsep Bendahara Pengeluaran	28

2.1.7. Efektivitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran	31
2.2. Penelitian Terdahulu	35
2.3. Kerangka Pemikiran.....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
3.1. Desain Penelitian	42
3.2. Fokus Penelitian.....	42
3.3. Definisi Konsep	44
3.4. Unit Analisis	45
3.5. Instrumen Penelitian	46
3.6. Jenis dan Sumber Data.....	46
3.7. Informan Penelitian.....	47
3.8. Teknik Pengumpulan Data.....	49
3.9. Teknik Analisis Data.....	53
3.10. Uji Keabsahan Data	56
3.11. Lokasi dan Waktu Penelitian	57
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	58
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	58
4.1.1. Kondisi Geografis	58
4.1.2. Topografi	61
4.1.3. Geologi.....	63
4.1.4. Hidrologi.....	64
4.1.5. Klimatologi	67
4.1.6. Pemanfaatan Wilayah Lahan	68
4.1.7. Daerah Kerawanan Bencana	69
4.1.8. Demografi	70

4.1.9. Pendidikan	74
4.1.10. Gambaran Umum Pelaksana Kebijakan	77
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	113
5.1. Efektivitas penggunaan SIPD dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran di Kabupaten Kupang	113
5.1.1. Pencapaian Tujuan.....	113
5.1.2. Integrasi	140
5.1.3. Adaptasi	151
5.2. Faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penggunaan SIPD dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran di Kabupaten Kupang.....	174
5.2.1. Faktor Internal.....	174
5.2.2. Faktor Eksternal.....	178
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	180
6.1. Kesimpulan	180
6.2. Saran	181
6.2.1. Saran Teoritis	181
6.2.2. Saran Praktis	182
DAFTAR PUSTAKA	184
LAMPIRAN.....	189

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : Masalah pengelolaan keuangan secara elektronik menggunakan SIPD di Kabupaten Kupang.....	5
Tabel 2.1 : Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan	38
Tabel 3.1 : Fokus penelitian pada dimensi efektivitas menurut Duncan	43
Tabel 3.2 : Key Informan	49
Tabel 4.1 : Luas wilayah Kabupaten Kupang berdasarkan kecamatan.....	59
Tabel 4.2 : Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berpotensi terjadi banjir di Kabupaten Kupang	66
Tabel 4.3 : Penggunaan Lahan di Kabupaten Kupang	68
Tabel 4.4 : Jumlah penduduk Kabupaten Kupang tahun 2019-2021	71
Tabel 4.5 : Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur	72
Tabel 4.6 : Jumlah Sekolah di Kabupaten Kupang tahun 2022	74
Tabel 4.7 : Jumlah Guru di Kabupaten Kupang 2022.....	75
Tabel 4.8 : Jumlah Murid di Kabupaten Kupang 2022.....	76
Tabel 5.1 : Progres kurun waktu pencapaian pengelolaan keuangan yang terintegrasi secara elektronik di Kabupaten Kupang.....	119
Tabel 5.2 : Rekapitulasi permasalahan penatausahaan keuangan dan pelaporan keuangan secara elektronik menggunakan SIPD oleh Bendahara Pengeluaran pada tahun 2021 dan 2022	129
Tabel 5.3 : Dasar Hukum penggunaan SIPD	137
Tabel 5.4 : Daftar Bendahara Pengeluaran yang memiliki sertifikat kompetensi Bendahara	161
Tabel 5.5 : Latar belakang pendidikan Bendahara Pengeluaran di Kabupaten Kupang.....	162

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 : Langkah implementasi kebijakan publik dalam melakukan intervensi menurut Mazmanian dan Sabatier	10
Gambar 2.2 : Hubungan timbal balik efektivitas menurut Mahmudi	13
Gambar 2.3 : Tampilan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	25
Gambar 2.4 : Tampilan Sistem Informasi Pembangunan Daerah.....	25
Gambar 2.5 : Tampilan Bagian Informasi Keuangan Daerah.....	26
Gambar 2.6 : Kerangka pemikiran efektivitas penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran di Kabupaten Kupang ..	41
Gambar 3.1 : Model interaktif Miles dan Huberman.....	54
Gambar 4.1 : Peta Administrasi Kabupaten Kupang	61
Gambar 4.2 : Peta Topografi Kabupaten Kupang.....	62
Gambar 4.3 : Peta Geologi Kabupaten Kupang	64
Gambar 4.4 : Peta Hidrologi Kabupaten Kupang	65
Gambar 4.5 : Peta Curah Hujan Kabupaten Kupang	67
Gambar 4.6 : Peta Tutupan Lahan Kabupaten Kupang.....	69
Gambar 4.7 : Peta Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Kupang	70
Gambar 5.1 : Konsultasi Penatausahaan Keuangan dari beberapa SKPD	131
Gambar 5.2 : Konsultasi Penatausahaan Keuangan dari Kecamatan Amarasi Barat	131
Gambar 5.3 : Konsultasi Penatausahaan Keuangan dari LPSE	132

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019.....	190
Lampiran II Pedoman Wawancara.....	204
Lampiran III Pedoman Observasi	210
Lampiran IV Matrix Hasil Triangulasi Wawancara.....	211
Lampiran V Dokumentasi Wawancara	229
Lampiran VI Dokumentasi Observasi.....	234

DAFTAR AKRONIM DAN SINGKATAN

Daftar Akronim :

AKLAP	: Akuntansi Pelaporan
Bimtek	: Bimbingan Teknis
Diskominfo	: Dinas Komunikasi dan Informatika
Ditjen	: Direktorat Jenderal
Kabid	: Kepala Bidang
Kasubag	: Kepala Sub Bagian
Kasubid	: Kepala Sub Bidang
Kemendagri	: Kementerian Dalam Negeri
Pemda	: Pemerintah Daerah
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
Permenkeu	: Peraturan Menteri Keuangan
Perpres	: Peraturan Presiden
Renja	: Rencana Kerja
Renstra	: Rencana Strategis
Satker	: Satuan Kerja
Setda	: Sekretariat Daerah
SIMDA	: Sistem Informasi Manajemen Daerah

Daftar Singkatan :

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BKPSDM	: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
BPKAD	: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
BPS	: Badan Pusat Statistik

BUD	: Bendahara Umum Daerah
BUN	: Bendahara Umum Negara
DAS	: Daerah Aliran Sungai
GU	: Ganti Uang
KPPN	: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KUA	: Kebijakan Umum APBD
LAK	: Laporan Arus Kas
LO	: Laporan Operasional
LPE	: Laporan Perubahan Ekuitas
LPJ	: Laporan Pertanggungjawaban
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
NTT	: Nusa Tenggara Timur
PA	: Pengguna Anggaran
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PP	: Peraturan Pemerintah
PPAS	: Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
PPK	: Pejabat Pembuat Komitmen
PPK	: Pejabat Penatausahaan Keuangan
PPTK	: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
RDTL	: Republik Demokratik Timor Leste
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
SAL	: Saldo Anggaran Lebih
SDM	: Sumber Daya Manusia
SE	: Surat Edaran
SIPD	: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SP2D	: Surat Perintah Pencairan Dana
SPD	: Surat Penyediaan Dana
SPM	: Surat Pertanggungjawaban Mutlak
SPP LS	: Surat Permintaan Pembayaran Langsung
SPP	: Surat Permintaan Pembayaran
TBP	: Tanda Bukti Pembayaran
TPP	: Tanda Pemotongan Pajak
TU	: Tambah Uang
UP	: Uang Persediaan
UU	: Undang-Undang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Implementasi kebijakan dianggap sebagai kegiatan membawa suatu hasil yang berhubungan dengan penyelesaian suatu pekerjaan yang pada prosesnya menyediakan sarana atau alat untuk mencapai hasil yang bersifat praktis (Tachjan, 2006:25). Pramono (2020:2) menjelaskan bahwa pada prinsipnya implementasi merupakan suatu proses penerapan kebijakan agar suatu kebijakan bisa mencapai tujuannya. Mazmanian dan Sabatier (dalam Hill dan Hupe, 2002:7) mengatakan bahwa implementasi adalah keputusan untuk menetapkan tujuan yang ingin dicapai melalui berbagai cara. Proses ini dapat dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan (peraturan) dari lembaga pelaksana.

Implementasi kebijakan khusus untuk sektor sistem informasi di bidang pemerintahan dilakukan untuk memberi payung hukum bagi pelaksanaan suatu ide dalam pelaksanaan pemerintahan yang akuntabel. Hal ini merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi yang berorientasi pada perkembangan teknologi dan informasi. Menurut Dwiyanto (2008:30-31) kemajuan ilmu pengetahuan di bidang informatika dan komunikasi telah memberi kesempatan pemerintah menjalankan visi misi pelayanan kepada publik secara berdaya guna dan berhasil guna untuk menjawab tantangan global dengan mengembangkan pemerintah yang lebih demokratis. E-government bagian dari pelayanan publik yang mengandalkan teknologi informasi dan komunikasi. (Riani et al, 2021) mengemukakan bahwa e-government merupakan implementasi kebijakan yang mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan akses layanan bagi publik.

Era modern yang serba digital memberi pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi ini sangat membantu dalam pemerintahan. Terutama bagi pemerintah daerah yang dituntut untuk merancang dan merumuskan sendiri program pembangunannya dengan menyediakan informasi sedetail mungkin mengenai program pembangunan yang akan dilakukan. Salah satunya dalam bidang perencanaan pembangunan daerah, keuangan daerah dan informasi lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan di daerah. Pemanfaatan teknologi informasi ini salah satunya untuk mewujudkan e-government di tingkat pemerintah daerah. Pemanfaatan sistem informasi di tingkat pemerintahan daerah dilakukan sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh aparatur pemerintah daerah. Hal ini dilakukan agar informasi mengenai perencanaan pembangunan, informasi keuangan daerah dan informasi pelayanan publik mampu ditampilkan secara transparan kepada masyarakat.

Bentuk pelaksanaan sistem informasi di tingkat pemerintahan adalah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Sistem ini dirancang untuk merumuskan perencanaan pembangunan di tingkat daerah dengan tujuan agar perencanaan pembangunan tercover dalam satu kesatuan. SIPD merupakan aplikasi berbasis web yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri. SIPD ini merupakan sistem yang mendokumentasi dan mengadministrasi serta memproses bahan pembangunan daerah, yang didalamnya memuat tentang informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang disajikan dalam bentuk informasi kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Informasi yang ada di dalam sistem informasi ini nantinya akan terkumpul dalam satu data base sebagai bentuk mewujudkan ide Satu Data Indonesia dan akan dipakai sebagai acuan pengambilan kebijakan di tingkat daerah.

Dalam melaksanakan ketentuan tentang SIPD maka Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah untuk memberi landasan yuridis kepada daerah untuk membuat rencana strategis melalui penyusunan anggaran daerah seperti Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) terkait pembangunan di daerah. Rencana strategis yang dilakukan akan terbentuk melalui draf Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga pada penetapan APBD.

Bagian sistem informasi keuangan daerah di SIPD adalah sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasi dan mengolah semua sistem keuangan daerah yang terintegrasi secara elektronik dalam bentuk informasi perencanaan anggaran daerah, informasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, informasi barang milik daerah dan informasi keuangan daerah lainnya. Informasi pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah dihasilkan dari pelaksanaan pengelolaan keuangan yang berbasis elektronik yang pelaporannya dilaksanakan secara bulanan/semester/tahunan. Penerapan SIPD diharapkan memudahkan proses pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Bendahara sehingga pelaksanaan perencanaan, penganggaran pemanfaatan dan pengelolaan dan pelaporan keuangan lebih cepat, lebih efektif, efisien dan lebih transparan.

Dalam penelitiannya, Fahzura dan Najamudin (2022:11) menemukan bahwa implementasi SIPD di daerah belum efektif karena masih ada kendala dalam penatausahaan keuangan. Penyebabnya adalah sosialisasi penggunaan SIPD belum dilakukan dengan baik antara unit pembina SIPD di daerah dengan SKPD pengguna SIPD di daerah. Hal yang sama ditemukan oleh Balqis, Fadhly dan Mauliyanda (2021:15) dalam penelitiannya terkait

implementasi SIPD di Kabupaten Aceh Barat, bahwa penggunaan SIPD belum didukung oleh pengetahuan dan keterampilan pengguna SIPD, sistem yang eror dan sosialisasi penggunaan SIPD yang belum maksimal sehingga menyebabkan pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan, penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan terkendala.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang telah menerapkan SIPD sejak tahun 2020. Tahap awal dilakukan dengan menyusun rencana kerja (renja) tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kupang tahun anggaran 2021. Dalam pelaksanaan ini, perangkat kerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang diharuskan untuk merancang, menyusun dan merumuskan semua program kegiatan kerja dan perencanaan pembangunan dengan menggunakan SIPD yang termasuk di dalamnya berisi informasi keuangan daerah seperti sistem pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran di Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang. Menurut Ekaputra (2021:1) untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan perencanaan terhadap kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. Pengelolaan keuangan merupakan proses yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena berkaitan dengan tujuan dari pemerintahan itu sendiri yaitu untuk mensejahterakan rakyatnya melalui pembangunan yang akan dilakukan.

Dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran di Kabupaten Kupang ternyata menimbulkan beberapa permasalahan yang cukup menghambat pelaksanaan kegiatan program pembangunan. Sesuai dengan hasil observasi awal dan juga interview awal yang dilakukan terhadap 3 (tiga) Bendahara Pengeluaran, yaitu interview terhadap Bendahara Pengeluaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Bendahara Pengeluaran Kecamatan Fatuleu Barat dan Bendahara Pengeluaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, hasilnya menyebut bahwa dalam pengelolaan keuangan menimbulkan

terhambatnya penatausahaan keuangan dan segi pelaporan menimbulkan penyusunan laporan tahunan yang tidak bisa dilakukan secara elektronik menggunakan SIPD dan penyusunan laporan yang berlarut larut dari target yang ditetapkan.

Tabel 1.1 : Masalah pengelolaan keuangan secara elektronik menggunakan SIPD di Kabupaten Kupang

Nomor	Masalah Yang dihadapi	Jumlah Bendahara Pengeluaran Yang Mengalami Masalah SIPD	Keterangan
1	Penatausahaan keuangan	32 Bendahara Pengeluaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendobelan atau nominal yang diajukan tidak sesuai, 2. Aplikasi SIPD tidak bisa diakses dan tidak bisa mencetak berkas/surat yang berhubungan dengan penatausahaan keuangan.
2	Laporan keuangan berbasis elektronik	59 Bendahara Pengeluaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. 59 (lima puluh sembilan) Bendahara Pengeluaran tidak bisa membuat laporan keuangan secara elektronik sehingga dialihkan secara manual. 2. Laporan melewati target yang ditentukan (31 Maret) – selesai di minggu pertama bulan Mei 2022.

(Sumber : BPKAD Kabupaten Kupang Tahun 2022)

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan secara elektronik menggunakan SIPD tidak bisa dilakukan secara maksimal karena menimbulkan permasalahan di penatausahaan keuangan dan pelaporan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran di Kabupaten Kupang. Hal inilah yang menjadi faktor pendorong utama peneliti untuk meneliti lebih mendalam mengenai pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Bendahara

Pengeluaran menggunakan SIPD di Kabupaten Kupang dengan judul “Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam Pengelolaan Keuangan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran di Kabupaten Kupang”.

1.2. Rumusan Masalah

Mengacu pada pembahasan latar belakang di atas maka peneliti menguraikan pokok permasalahan sebagai berikut : Bagaimana efektivitas penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran di Kabupaten Kupang ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Untuk menganalisis efektivitas penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran di Kabupaten Kupang.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Produk dari penelitian ini bisa menjadi menjadi bahan informasi, referensi dan kajian yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu administrasi publik yang berhubungan dengan penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran di tingkat pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Kupang.

2. Manfaat Praktis

Hasil yang didapat dari penelitian ini semoga dapat menjadi bahan saran, telaah dan rujukan atas penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran di Kabupaten Kupang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aralal, Eduardo. 2012. *Routledge Handbook Of Public Policy*. Oxon : Routledge.
- Creswell, John. W. 2018. *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (Fourth Edition)*. USA : Sage Publication.
- Damsar. 2017. *Pengantar Teori Sosiologi*. Cetakan Kedua. Jakarta : Kencana.
- Depdikbud. 2010. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Dwiyanto, A. 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Gibson, J., I . 2011. *Organisasi Perilaku Struktur Proses*. Jilid 1. Jakarta : Binarupa Aksara.
- Hill, M., & Hupe, P. 2002. *Implementing Public Policy: Governance In Theory And In Practice*. London : Thousand Oaks.
- Indrawijaya, Adam. I. 2010. *Teori, Perilaku, Dan Budaya Organisasi*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Kasim, A. 1993. *Pengukuran Efektivitas Dalam Organisasi*. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Mahmudi, M. 2015. *Manajemen Sektor Publik*. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Martini dan Lubis. 1987. *Teori Organisasi*. Bandung: Ghalia Indonesia.
- Mazmanian, D & Zabatier, P. A. 1983. *The Implementation Of Public Policy: A Framework Of Analysis*. California : Pomona College.
- Mondy R Wayne. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Erlangga.
- Nugroho, R., D. 2003: *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Patton, Michael,. Q. 2009. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Cetakan Ke 2. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Pramono, J. 2020. *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta : Unisri Press.
- Purwanto, A. E., Sulistyastuti, R. D. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Siagian, Sondang,. P. 1995. *Peranan Staf Dalam Manajemen*. Jakarta : Gunung Agung.
- Sriati. 2013. *Metode Penelitian Sosial*. Palembang. Unsri Press.
- Steers, R., M. 2020. *Efektivitas Organisasi*. Cetakan Ke 2. Jakarta : Erlangga.

- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI).
- Tangkilisan, H., Nogi,. S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Van Meter, D.S. & Van Horn, C.E. 1975. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. Ohio State: Sage Publications, Inc. Vol.6 No. 4.
- Yunus, H., A. & Nawawi, Wahyudin. 2013. *Teori Organisasi*. Majalengka : Unit Penerbitan Universitas Majalengka.

JURNAL DAN TESIS

- A'Lalila. (2019). *Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Di Kabupaten Musi Rawas Utara*. Tesis. Program Studi Administrasi Publik Universitas Sriwijaya.
- Anjaswari. (2019). *Kinerja Implementasi Kebijakan Desa Tangguh Bencana (Destana) Di Desa Sukabanjar Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan*. Tesis. Program Studi Administrasi Publik Universitas Sriwijaya.
- Apriellyany, T. D., Widyastuti, Y., & Jumiati, I. E. (2019). Efektivitas program kawasan desa mandiri pangan di Kecamatan Baros Kabupaten Serang. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2).
- Balqis, N., Fadhly, Z., & Az, M. (2021). Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 11(1), 146-161.
- Bintari, W. C., Wijastuti, R. D., & Zain, E. M. (2021). Pengelolaan Keuangan Program Unggulan Sumber Daya Manusia Konstruksi Pada Kegiatan Bimbingan Teknis Manager Kontraktor Pengusaha Orang Asli Papua. *Abdimas: Papua Journal of Community Service*, 3(2), 37-41.
- Denisova, V. (2019). Blockchain infrastructure and growth of global power consumption. *International Journal of Energy Economics and Policy*.
- Deseverians, R., & Wulandari, S. (2020). Efektivitas Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Sipd) Dalam Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 12(1), 13-30.
- Ekaputra, N. D. (2021). Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Penyusunan Dokumen RKPD Di Kabupaten Nganjuk. *Otonomi*, 21(1), 62-79.
- Fahzura, L., & Najamuddin, N. (2022). Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat. *Journal of Social and Policy Issues*, 7-13.

- Hasrina, Y. (2015). Analisis Pengelolaan Keuangan Rural Infrastructure Support Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Risâ€“pnpm) di Organisasi Masyarakat Setempat (Oms) Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya*, 13(4), 475-486.
- Ilmi, H. Z. (2016). Perancangan Sistem Informasi Pencarian Asisten Rumah Tangga Berbasis Web. *Jurnal Manajemen Informatika*, 6(1).
- Iriani, D. (2011). Hukum sebagai alat kontrol sosial dan sistem supremasi penegakan hukum. *Justicia Islamica*, 8(1).
- Kharisma, V. D. (2013). Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 11(1), 94-102.
- McShane, I., & Coffey, B. (2022). Rethinking community hubs: community facilities as critical infrastructure. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 54, 101149.
- Nadir, R., Tawakkal, T., Yusrianti, E., & Arsyad, M. (2021). Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Dan Komitmen Organisasi Terhadap Hubungan Antara Partisipasi Penyusunan Anggaran Dan Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemda Kabupaten Wajo). In *Seminar Nasional Hasil Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat (SNP2M)* (pp. 127-132).
- Nasution, M. I., & Si, N. M. (2021). Analisis penerapan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 9(2), 109-116.
- Natalia, D. E., Murni, S., & Untu, V. N. (2019). Analisis Tingkat Literasi Dan Pengelolaan Keuangan Pribadi Mahasiswa Di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(2).
- Niati, A., Sulistiyono, A., & Ariefiantoro, T. (2019). Pengembangan Kemampuan Sumber Daya Manusia melalui Pelatihan Komputer Microsoft Office Excel untuk Meningkatkan Kinerja Perangkat Desa Mranggen. *E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 10(1), 105-110.
- Pak, K., Kooij, D. T., De Lange, A. H., & Van Veldhoven, M. J. (2019). Human Resource Management and the ability, motivation and opportunity to continue working: A review of quantitative studies. *Human Resource Management Review*, 29(3), 336-352.
- Rahmatiah, D. R. (2016). Analisis Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaianya Pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1).
- Riani, D., Putri, G. A. A., & Pratama, I. P. A. E. (2021). E-Readiness Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Menggunakan Metode Technology Acceptance

- Model (TAM)(Studi Kasus Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gianyar). *JITTER: Jurnal Ilmiah Teknologi dan Komputer*, 2(3), 503-514.
- Sari, C. N., Heriyanto, M., & Rusli, Z. (2018). Efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 16(2), 135-141.
- Selviani, Afni. (2019). *Implementasi Kebijakan Pengendalian Banjir Pada Sistem Sungai Bendung Kota Palembang*. Tesis. Program Studi Administrasi Publik Universitas Sriwijaya.
- Setyarini, E. A., & Herlina, L. L. (2013). Kepatuhan Perawat Melaksanakan Standar Prosedur Operasional Pencegahan Pasien Resiko Jatuh di Gedung Yosep 3 Dago dan Surya Kencana Rumah Sakit Borromeus. *Jurnal Kesehatan*, 94-105.
- Solihat, M. (2008). Komunikasi Massa dan Sosialisasi. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 9(1), 105-112.
- Suandi, I. W. (2010). Eksistensi Kebijakan Publik dan Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 1(1).
- Sudiarsa, I. K. P. (2019). Perancangan Sistem Informasi Akademik Universitas Mahendradatta Berbasis Web Dengan Metode Waterfall. *Jurnal Ilmiah Vastuwidya*, 2(1), 58-64.
- Susilawati, H. (2016). Pengaruh Peran Bendahara Pengeluaran Dan Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Sigi. *Katalogis*, 4(6).
- Wijaya, S. (2018). *Efektivitas Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) Di Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang*. Tesis. Program Studi Administrasi Publik Universitas Sriwijaya.

PERATURAN

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.05/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/Pmk.O5/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 170/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 905/255/Keuda tanggal 18 Januari 2021 tentang Tindak Lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/145/SI.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/736/SJ tanggal 27 Januari 2020 tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

SUMBER LAIN

[APBD KABUPATEN KUPANG \(kupangkab.go.id\)](http://kupangkab.go.id)

<https://nasional.kontan.co.id/news/bukan-hanya-untuk-pengelolaan-keuangan-daerah-saja-ini-manfaat-lain-dari-sipd>

<https://www.kompasiana.com/katapublik/60659e8a8ede48065a736742/sipd-dan-tantangannya>

kupangkab.bps.go.id